

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintahan desa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi yang produktif serta menyediakan berbagai sarana usaha yang beragam guna meningkatkan kesejahteraan mereka (Sinarwati et al., 2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “*Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.*” Hal ini semakin didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mana dalam peraturan tersebut terdapat pertimbangan dibentuknya BUMDes yakni bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah desa dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang mana pendirian badan usaha milik desa ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa tersebut (Ansori et al., 2022).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah BUMdes terbanyak di Bali. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan desa, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong setiap desa agar mampu membentuk dan mengatur perekonomian desa melalui pembentukan BUMDes.

Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat tiap tahunnya yang dapat dilihat dari data <https://bali.bps.go.id/>, jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebanyak 41,68 ribu jiwa, artinya keberadaan BUMDes di Kabupaten Buleleng dengan jumlah BUMDes terbanyak di Provinsi Bali belum mampu mencapai tujuan BUMDes yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. Data jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 1 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Gerokgak	13
2	Seririt	20
3	Busungbiu	13
4	Banjar	17
5	Sukasada	13
6	Buleleng	12
7	Sawan	13
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
<b>Jumlah</b>		<b>124</b>

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021)  
[\(https://dpmddukcapil.baliprov.go.id/\)](https://dpmddukcapil.baliprov.go.id/)

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa, seharusnya BUMDes mampu mengimplementasikan cara yang tepat dalam mendukung kinerja dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem yang mampu meningkatkan nilai perusahaan untuk semua pemangku kepentingan Perusahaan (Masitoh & Hidayah, 2018). *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur perusahaan agar perusahaan mampu memberikan informasi yang jelas, benar dan tepat waktu kepada pemegang saham, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan harus

bersifat akurat, transparan dan tepat waktu agar semua penerima informasi dapat mengetahui kinerja perusahaan yang sebenarnya. Peran dari (GCG) juga digunakan untuk mengurangi praktik manajemen laba dan keterbukaan laporan keuangan (Ningrat & Dewi, 2022).

*Good Corporate Governance* merupakan praktik tata kelola perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, secara umum terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu: 1) *Transparency* merupakan prinsip mengenai keterbukaan informasi perusahaan itu sendiri, keterbukaan ini dirujuk pada pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2) *Accountability* yaitu prinsip yang menjelaskan mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3) *Responsibility* adalah prinsip yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang terdiri dari kesesuaian atau kepatuhan perusahaan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4) *Independency* merupakan prinsip kemandirian yang menyangkut keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5) *Fairness* merupakan prinsip kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Masitoh & Hidayah, 2018).

*Good Corporate Governance* memiliki peranan untuk meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan, Hal ini didukung oleh pendapat Hirman & Sukirman (2023) menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya (GCG) adalah menghasilkan nilai tambah bagi BUMDes, dan meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMDes untuk memajukan perekonomian desa. Kinerja BUMDes adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan organisasi BUMDes dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yang direalisasikan melalui kegiatan, program, kebijakan, sasaran, tujuan, visi dan misi yang ditetapkan. *Good Corporate Governance* (GCG) umumnya sering diterapkan pada instansi besar, dibandingkan dengan instansi kecil seperti BUMDes. Adapun penyebab yang mendasari permasalahan tersebut yakni sumber daya yang terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik secara konsisten. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hirman & Sukirman (2023) yang menunjukkan bahwa Implementasi (GCG) pada BUMDes yang terletak di Kecamatan Bungoro Sulawesi Selatan belum efektif dapat meningkatkan kinerja BUMDes akibat dari manajemen yang kurang professional.

Masalah yang dijelaskan di atas seharusnya tidak menjadi hambatan besar untuk BUMDes dapat melakukan praktik prinsip-prinsip (GCG) melihat perkembangan BUMDes yang semakin dilirik oleh masyarakat dan juga mendapat kepercayaan oleh masyarakat banyak, melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* besar harapan bahwa BUMDes dapat lebih professional, berkarakter yang berpegang teguh pada kultur serta budaya yang dimiliki setiap daerahnya serta dapat meningkatkan kinerjanya, karena salah satu langkah

BUMDes dapat mencapai tujuannya adalah meningkatkan kinerjanya, BUMDes yang memiliki kinerja yang baik dapat dilihat baik dari kinerja keuangan maupun non keuangan (Sinarwati & Prayudi, 2021). Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini berfokus pada BUMDes Kencana Sari Amertha yang terletak di Desa Penglatan, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini berfokus pada BUMDes tersebut karena dalam melaksanakan operasional kerjanya, BUMDes Kencana Sari Amertha telah melaksanakan kewajiban praktik *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan melalui transparansi dan akuntabel pada pengelolaan administrasinya, serta berhasil ditingkatkan di tahun 2022, hal tersebut diungkapkan melalui data laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Kencana Sari Amertha Tahun 2022, bentuk *Transparency, Accountability* pada pengelolaan administrasi tersebut juga diperjelas kembali oleh Bapak I Made Budi Wilaksana selaku Ketua BUMDes, bahwa BUMDes Kencana Sari Amertha telah melakukan *Transparency* melalui kegiatan usaha yang dilakukan dengan sistem digitalisasi, baik itu dalam usaha simpan pinjam, dan pembayaran air bersih, sehingga seluruh rincian pembayaran dapat dipahami dengan jelas oleh nasabah, *Transparency* disini merujuk pada pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak yang bersangkutan (Rahayu & Dewi, 2022). Praktik *Accountability*, BUMDes selalu membuat laporan setiap bulannya dalam bentuk rancangan kerja, neraca, laba rugi, berita acara uang kas, serta dilaporkan dalam

rapat bulanan bersama seluruh pengurus, yang nantinya disampaikan dalam musyawarah desa pada akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban BUMDes kepada seluruh pemangku kepentingan.

Alasan memilih BUMDes Kencana Sari Amertha sebagai tempat penelitian, karena berdasarkan hasil observasi awal banyak masyarakat setempat menyampaikan terdapat masalah mengenai kinerja dari BUMDes Kencana Sari Amerta yaitu pada produk usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDes belum terbuka, banyak masyarakat mengeluhkan bahwa pembayaran penggunaan air tidak sesuai dengan kapasitas penggunaan air dalam rumah tangga, sebelum air bersih dikelola oleh BUMDes tagihan pembayaran air tidak sebanyak tagihan ketika dikelola oleh BUMDes, oleh karena itu masyarakat masih menganggap bahwa kinerja dari BUMDes belum optimal, belum ada tindak lanjutan yang dilakukan oleh BUMDes mengenai masalah ini, baik itu dilakukan melalui rapat desa, atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah ini, sehingga sering terjadi pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh BUMDes Kencana Sari Amerta masih kurang optimal. Penuturan tersebut juga dituangkan pada *LPJ BUMDes Kencana Sari Amerta tahun 2022*, “*Banyaknya pelanggan yang merasa pembayaran air tidak sesuai dalam pemakaian*” permasalahan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan pembayaran pelanggan yang cukup besar dimana terdapat 196 pelanggan nunggak bayar yang dihitung dari seluruh banjar, dan bernilai Rp. 41.770.063, sesuai dengan data di bawah ini.

Tabel 1. 2

Tabel Jumlah Tunggakan di masing-masing Banjar Dinas

Banjar Dinas	Jumlah pelanggan	Tunggakan Belum terbayar	Tunggakan (%)	Water Meter rusak
Sanih	343	54	15.7	74
Kajanan	397	44	11.0	75
Kelodon	434	60	13.8	32
Dauh Tukad	416	38	9.1	53
<b>Jumlah</b>	<b>1590</b>	<b>196</b>	<b>12.3</b>	<b>234</b>

(Sumber: LPJ 2022 BUMDes Kencana Sari Amertha)

Tabel 1. 3

Total Tunggakan di masing-masing Banjar

Banjar Dinas	Tunggakan 3-7 Bulan	Tunggakan 7-12 Bulan	Tunggakan > 12 Bulan	Total Jumlah pelanggan
Sanih	3.201.750	8.081.000	1.876.565	13.159.315
Kajanan	1.121.750	2.349.400	5.167.527	8.638.677
Kelodon	2.346.750	9.955.350	5.036.496	17.338.596
Dauh Tukad	558.250	883.525	1.191.700	2.633.475
<b>Total</b>	<b>7.228.500</b>	<b>21.269.275</b>	<b>13.272.288</b>	<b>41.770.063</b>

(Sumber: LPJ 2022 BUMDes Kencana Sari Amertha)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terdapat tunggakan yang belum terbayar sebesar 12,3% dari seluruh pelanggan unit usaha air bersih,

sehingga menghasilkan kurangnya penerimaan kas dengan jumlah kurang lebih Rp41.770.063, kemudian pada unit usaha pasar juga belum secara optimal dapat dioperasikan, pada akhir Desember 2018 sampai dengan Desember 2021, sejak dibuka pada tanggal 19 Maret 2018 jumlah pedagang yang terdaftar namun ada yang hanya menyewa namun tidak melaksanakan aktivitas penjualan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4  
Jumlah Pedagang dan Perkembangannya

No	Bulan/Tahun	Jumlah Pedagang yang terdaftar	Jenis Dagangan/Jasa	Tidak Beraktifitas
1	Maret 2018	30	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	12
2	Mei 2018	32	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	14
3	Juni 2018	32	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	21
4	Juli 2018	29	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	21
5	Agustus 2018	29	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	10
6	September 2018	29	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	7
7	Oktober 2018	29	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	6
8	November 2018	29	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	4
9	Desember 2019	5	Kuliner,Palen-Palen,Sembako	1
10	Desember 2020	3	Penjahit,Kuliner,Palen-Palen	-
11	Desember 2021	4	Penjahit,Kuliner,Palen-Palen	1

(Sumber: LPJ yang dibuat oleh BUMDes Kencana Sari Amertha)

Tabel di atas terlihat jumlah pedagang setiap bulan nya semakin menurun ini disebabkan oleh persaingan pasar, serta kurangnya monitoring dari pihak

BUMDes kepada pelanggan untuk menciptakan usaha yang inovatif. Menurunnya jumlah pedagang tentunya memberikan dampak yaitu penurunan jumlah penerimaan kas dari unit usaha pasar BUMDes Kencana Sari Amertha.

Kedua permasalahan di atas mengakibatkan masalah pada kinerja keuangan BUMDes Kencana Sari Amertha, yaitu adanya penurunan perolehan laba dari tahun 2021 ke tahun 2022, perolehan laba tahun 2022 sebesar Rp282.215.510, sedangkan di tahun 2021 perolehan laba yang didapatkan sebesar Rp297.947.535. Dengan demikian penurunan laba yang dialami oleh BUMDes Kencana Sari Amertha adalah Rp15.732.022. Hal tersebut berdampak tidak terpenuhinya rancangan kerja tahun 2022, yaitu perolehan SHU yang diharapkan sebesar Rp306.092.575, namun SHU hanya mampu tercapai sebesar Rp282.215.510, dengan kekurangan target sebesar Rp23.877.065, atau minus 7.80%, data tersebut diungkapkan pada Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Kencana Sari Amertha (LPJ) tahun 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas maka motivasi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana peran implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berperan bagi Kinerja BUMDes Kencana Sari Amertha. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Kinerja Pada BUMDes Kencana Sari Amertha”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Bersumber dari uraian latar belakang masalah, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi (GCG) masih belum efektif dilakukan oleh BUMDes, sehingga sering terjadi permasalahan dalam tata kelola BUMDes yang berperan pada kinerja.
2. Kurangnya Kemampuan BUMDes dalam pengelolaan pelayanan kepada masyarakat, yaitu banyak pelanggan yang komplain terhadap jumlah pembayaran air karena tidak sesuai dengan pemakaian.
3. Adanya penunggakan pembayaran air yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari ketidaksesuaian antara pemakaian air dengan pembayaran yang harus dilakukan, sehingga mengakibatkan .
4. Terjadi penurunan jumlah pedagang di unit pasar, karena kurangnya optimalisasi pada unit usaha
5. Menurunnya Pendapatan Laba, sehingga tidak tercapainya rancangan kerja, karena SHU menurun

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Bersumber dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini yakni menganalisis Peran Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Kinerja Keuangan BUMDes Kencana Sari Amertha Pnglatan BUMDes agar terarah dengan ilmu akuntansi yang didapatkan peneliti.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang masalah, berikut merupakan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*) pada BUMDes Kencana Sari Amertha Penglatan?
2. Bagaimana Peran Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Kinerja BUMDes Kencana Sari Amertha Penglatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat dipaparkan beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*) pada BUMDes Kencana Sari Amertha Penglatan.
2. Mengetahui Peran Implementasi *Good Corporate Governance* bagi kinerja BUMDes Kencana Sari Amertha Penglatan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan di bidang akuntansi serta memberikan pemahaman mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini akan membantu peneliti untuk memahami konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan bagaimana penerapannya bagi kinerja BUMDes. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang prinsip-prinsip (GCG) yang relevan dalam konteks BUMDes.

### **b. Bagi BUMDes**

Implementasi (GCG) yang baik dalam BUMDes dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip, BUMDes dapat meningkatkan *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap BUMDes, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya.

### **c. Bagi Peneliti Lain:**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik yang serupa.